



Kasus Dana Bansos 'Singgah' ke Anggota Dewan Bergulir

SINGARAJA, NusaBali

Kasus dugaan dana bantuan sosial (bansos) untuk Kelompok Tani Ternak Manik Sari, Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, masih bergulir. Sinyalemen aliran dana yang disebut sempat mengalir ke anggota dewan itu semakin menguat.

Ini berdasarkan surat pernyataan Ketua Kelompok Tani Ternak (KTT) Manik Sari, yang menyatakan dana Bansos yang sudah cair senilai Rp 59,5 juta melalui rekening Bank BPD Unit Tamblang pada Jumat (11/9) telah diambil senilai Rp 49,5 juta.

Ketua Kelompok Wayan Sumana menyebut, dana tersebut tidak langsung menggunakan uang tersebut untuk membeli bibit sapi, babi dan pakan ternak sesuai yang diajukan dalam proposal.

Namun uang yang sudah ditarik dari rekening itu justru dititipkan kepada salah satu anggota DPRD Buleleng dari Fraksi Demokrat, Luh Hesti Ranitasari. Pertimbangannya, karena takut menyimpan uang dalam jumlah besar.

Informasi yang berhasil dihipunkan, Kamis (5/11), penarikan dan penyerahan ke anggota dewan itu dilakukan pada hari yang sama, yakni pada hari Jumat 11 September bersama bendahara kelompok mencairkan dana hibah di BPD Unit Tambang sebesar Rp 49.500.000.

Kemudian uang diserahkan kepada Luh Hesti Ranitasari di rumahnya di Desa Tamblang, dengan alasan takut menyimpan dana tersebut. Selanjutnya, uang tersebut baru digunakan untuk membeli

sapi kisaran 13-22 September 2015 dengan jalan membeli beberapa ekor sapi dengan total pembayaran Rp 42 juta.

Dari total 49.500.000 dikurangi 42.000.000 sisanya masih Rp 7.500.000. Kemudian tanggal 23 September 2015 bersama Bendahara kembali mengambil dana bansos di BPD Unit Tamblang Rp 10.500.000. Dengan rincian dana hibah Rp 10 juta, dan dana kelompok Rp 500 ribu. Pada tanggal 12 September membayar pembelian bibit babi sebesar Rp 7.500.000. Sementara dana Rp 10.500.000 untuk pembelian pakan sebanyak 2.625 kg di UD Eka.

Rincian surat pernyataan tersebut dibuat pada tanggal 28 Oktober 2015, lengkap dengan materai Rp 6 ribu. Hanya saja, ada salah satu pihak yakni Sekretaris Wayan Rediana yang belum memberikan tandatangan dalam surat pernyataan itu. Surat pernyataan hanya ditandatangani Ketua KTT Manik Sari Tamblang, Wayan Sumana, lengkap dengan stempel.

Nah, akibat pergolakan dibawah, sejumlah petugas dari Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Buleleng sempat dua kali mengecek ke lokasi. "Dana Bansos sudah sesuai peruntukannya, petugas kami sudah dua kali mengecek kesana," ungkap Kepala Distanak Buleleng, Nyoman Swatantra.

Disebutkan pada pengecekan pertama, tugasnya menemukan jika pembelian sapi masih belum lengkap, dan pengecekan kedua semuanya sudah lengkap. "Jadi

pengecekan yang kami lakukan sudah sesuai," tegas Swatantra.

Ketua KTT Wayan Sumana sendiri sempat mengelak telah membuat surat pernyataan, dimana aliran dana sempat dititipkan ke oknum anggota dewan. Namun setelah didesak, ini ada surat pernyataan yang ditemukan, Wayan Sumana buru-buru mengiyakan, bahwa dana bansos itu sudah dibelikan sapi dan babi, sesuai dengan yang ada di proposal.

Di sisi lain, anggota DPRD Kabupaten Buleleng, Luh Hesti Ranitasari menyebutkan jika surat pernyataan yang ditulis Sumana itu tidak benar. Jadi pihaknya tidak sempat menerima uang senilai Rp 49,5 juta dari kelompok Tani Ternak. Hanya saja, pihaknya mengakui sempat dipanggil Kadistanak. Dari Kadistanak menyebutkan jika sapi memang sudah ada.

"Ini hanya permasalahan teknis, itu saya yang bertanggungjawab melakukan pendampingan termasuk membantu untuk pendampingan untuk membuat laporan pertanggungjawaban. Karena saya yang memfasilitasi. Jadi sapi dan babi sudah diterima warga, dan tidak ada yang perlu dipermasalahkan lagi," tegas Luh Hesti Ranitasari.

Dia justru merasa seperti dikejar-kejar dengan bansos itu. Padahal itu hibah milik Pemkab dia yang memfasilitasi. Namun begitu dia paham betul akan kondisi persaingan politik yang terjadi. "Bupati sampai tahu hal ini, dan bansos itu memang tidak ada masalah," jelas Luh Hesti Ranitasari. **dek**

Edisi : Jumat, 6 November 2015

Hal : 4



Pembahasan RAPBD Karangasem 2016 Makin Alot

Dewan Tolak DAK- DAU Mengacu 2015

'Kalau digunakan DAU dan DAK yang acuannya diperoleh tahun 2015, saya tolak. Tidak bisa begitu, tunggu dulu agar alokasi anggaran dari pusat itu definitif,'

(Ketua DPRD Karangasem)

AMLAPURA, NusaBali
Kalangan DPRD Karangasem

menolak usulan eksekutif di pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

(R-APBD) 2016, yang akan mencantumkan DAU (dana alokasi umum) dan DAK (dana alokasi khusus) namun dengan menggunakan acuan tahun 2015 lalu. Dewan meminta DAU dan DAK mesti definitif, agar lebih mudah menyusun di penjabaran APBD 2016.

Ketua DPRD Karangasem I Nengah Sumardi mengingatkan eksekutif agar menunggu DAU dan DAK yang definitif untuk masuk di R-APBD 2016. Setelah itu barulah pembahasan bisa jalan. Sumardi menegaskan hal itu di Amlapura, Kamis (5/11).

"Kalau di R-APBD 2016 eksekutif mencantumkan DAU dan DAK yang acuannya diperoleh tahun 2015, saya tolak. Tidak

bisa begitu, tunggu dulu agar alokasi anggaran dari pusat itu definitif," kata Sumardi.

Disinggung, bisa saja acuan itu digunakan sementara DAU dan DAK tahun 2015, untuk masuk di R-APBD 2016, sambil melakukan pembahasan sambil menunggu DAU dan DAK definitif. "Oh, tidak bisa begitu, kacau nanti pembagian anggaran di R-APBD 2016," tambah politisi dari Partai Golkar asal Banjar Kreteg, Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem.

Meski pembahasan R-APBD 2016 terus molor, Sumardi tidak khawatir pembahasannya pada akhirnya tepat waktu, mengacu Permendagri No 52 tahun 2015. "Yang jelas pembahasannya pal-

ting terakhir per 30 November 2015, masih ada waktu" jelasnya.

Atas pernyataan Sumardi itu, dicurigai pembahasan R-APBD 2016 nanti, kurang optimal. Banyak materi yang tidak melalui pembahasan secara detail. "Tentu saja waktu pembahasannya dipercepat, dari pagi hingga tengah malam. Jangan sampai muncul ancaman anggota dewan dan eksekutif tidak dapat gaji, atas

keterlambatan pembahasan R-APBD 2016," tambahnya.

Mengenai kapan R-APBD dipaparkan DPRD, Sumardi belum mengetahui, masih tetap menunggu draf R-APBD 2016 dari eksekutif. Sedangkan rapat koordinasi membahas R-APBD sebelumnya, tidak menemui

titik temu.

Sesuai catatan DAU tahun 2015 sebesar Rp 614,9 miliar, DAK Rp 60,47 miliar, sedangkan BKK (bantuan keuangan khusus) dari Provinsi Bali Rp 84,81 miliar. Untuk defisit tahun 2015 Rp 43,414 miliar. APBD 2014 Rp 7,366 miliar. Tetapi masih di bawah defisit APBD 2013 Rp 136,16 miliar.

Defisit tertinggi APBD tahun 2012 153,29 miliar, APBD tahun 2011 Rp 20 miliar. Sedangkan defisit APBD tahun 2010 Rp 55,14 miliar, APBD tahun 2009 Rp 95,331 miliar dan APBD 2008 Rp 72,35 miliar.

Sedangkan target PAD tahun 2016 belum diketahui, untuk target PAD tahun 2015 Rp 200,27

miliar, naik 25 persen di bandingkan tahun 2014 yang sebelumnya Rp 160 miliar, tetap mengandalkan dari pajak hotel dan restoran, pajak galian C, BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) sesuai UU No 28 tahun 2009 dan sebagainya.

Di bagian lain Kepala Bappeda Karangasem I Ketut Sedana Merta memaparkan, sehubungan DAU dan DAK definitif tahun 2016 belum turun, maka acuannya DAU dan DAK tahun 2015, sambil menunggu DAU dan DAK definitif. Saya dapat informasi DAU dan DAK informal, sampai saat ini belum turun yang definitif," kata Sedana Merta. ☎ k16

Edisi : Jumat, 6 November 2015

Hal : 8



• NUSABALIYUDA

Prof Titib Kembali Terjerat Kasus Dana Punia

DENPASAR, NusaBali

Mantan Rektor Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar, Prof Dr I Made Titib, terpidana 2,5 tahun penjara kasus korupsi proyek pengadaan 14 item barang dan jasa di kampusnya, kembali terjerat dugaan korupsi dana punia. Prof Made Titib jadi tersangka kasus dana punia bersama mantan Pembantu Rektor II dan Kepala Biro Umum IHDN, Dr Praptini. Kedua akademisi terpidana kasus yang sama ini telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar, Kamis (5/11).

Baik Prof Made Titib maupun Dr Praptini, yang sudah setahun lebih

mendekam di penjara, dilakukan pelimpahan tahap II dalam kasus dugaan korupsi dana punia oleh Kejaksaan Tinggi (kejati) Bali ke Kejari Denpasar, Kamis kemarin. Pelimpahan kedua tersangka berikut barang buktinya ini dilakukan oleh empat Jaksa Penuntut Umum (JPU): I Gede Arthana, I Wayan Suardi, Akmal Kodrat, dan Hari Soetopo.

Setelah dilimpahkan dari Kejati Bali ke Kejari Denpasar, kasus dana punia yang menyeret Prof Made Titib dan Dr Praptini sebagai tersangka ini segera akan dilimpahkan pihak kejaksaan ke PN Denpasar, untuk selanjutnya disidangkan di

Pengadilan Tipikor Denpasar.

JPU Akmal Kodrat memaparkan, kasus yang kini menjerat Prof Made Titib dan Dr Praptini adalah dugaan pungutan liar dalam bentuk dana punia terhadap calon mahasiswa baru di IHDN Denpasar periode 2011-2012 lalu. "Dalam kasus dugaan korupsi ini, negara dirugikan hingga Rp 752.834.939 (atau Rp 752,84 juta) akibat dana punia tersebut," tandas Akmal Kodrat di Kejari Denpasar, Kamis kemarin.

Menurut Akmal Kodrat, kasus dugaan korupsi dana punia Rp 752,84 juta ini berawal dari kebi-

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1



Mantan Rektor IHDN Prof Dr I made Titib (pakai topi) yang terpidana 2,5 tahun saat dilimpahkan ke Kejari Denpasar, Kamis (5/11), setelah kembali terjerat kasus dugaan korupsi dana punia (Foto Kiri). Mantan Kepala Biro Umum IHDN Denpasar, Dr Praptini, yang sudah terpidana 6 tahun juga kembali terseret kjasus yang sama (Foto Kanan).

Edisi : Jum'at, 6 November 2015

Hal : 1



Sambungan - - -

Prof Titib Kembali Terjerat Kasus Dana Punia

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

jakan Prof Made Titib selaku Rektor IHDN dan Dr Praptini sebagai Kabiro Umum yang mengurangi biaya Sumbangan Dana Penunjang Pendidikan (SDPP) bagi calon mahasiswa baru. Kemudian, mereka mengalihkan selisih pengurangan biaya SDPP tersebut menjadi biaya dana punia. Biaya SDPP sebelumnya telah diatur dalam Keputusan Rektor No IHN/542a/Kep/2011 tertanggal 28 April 2011.

Rektor Prof Made Titib kemudian mengeluarkan Keputusan Rektor baru dengan nomor, tanggal, dan tahun yang sama. Namun, dalam keputusan tersebut menyebutkan tentang pengurangan nilai biaya SDPP. Lalu, Dr Praptini menindaklanjutinya dengan menyampaikan kepada panitia penerimaan mahasiswa baru IHDN tahun ajaran 2011-

2012, agar dalam pelaksanaan mencantumkan dana punia sebagai bagian dari biaya penerimaan mahasiswa baru.

Dana punia itu disebutkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan ibadah dan sosial yang anggarannya tidak tersedia atau tidak tercukupi. Untuk lebih meyakinkan, Dr Praptini mengatakan dana punia tersebut telah dikonsultasikan dan mendapat izin dari Kementerian Agama. Dari dana punia inilah didapat uang Rp 752,84 juta yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Baik tersangka Prof Made Titib maupun Dr Praptini dijerat Pasal 2 ayat 1, Pasal 3 jo Pasal 18 ayat 1 huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2010 tentang Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Prof Made Titib sebelumnya

telah divonis 2,5 tahun penjara plus bayar denda Rp 50 juta terkait kasus korupsi proyek pengadaan 14 item barang dan jasa di kampusnya pada 2011. Vonis tersebut dijatuhkan majelis hakim dalam sidang putusan di Pengadilan Tipikor Denpasar, Kamis, 2 Oktober 2014 lalu. Vonis hakim sama dengan tuntutan JPU.

Pada saat bersamaan, 2 Oktober 2014, Dr Praptini juga divonis majelis hakim hukumam 6 tahun penjara plus denda Rp 100 juta dalam kasus yang sama. Mantan Kepala Biro Umum IHDN ini divonis bersama tiga terdakwa lainnya di kasus yang sama: Drs I Nyoman Suweca (staf IHDN Denpasar), Ni Putu Indra Maritim ST (rekanan proyek IHDN Denpasar), dan Ir I Wayan Sudiasa (pihak rekanan proyek IHDN Denpasar).

Jika Dr Praptini divonis divonis 6 tahun penjara dan Prof

Made Titib diganjar 2,5 tahun penjara, maka Nyoman Suweca divonis hukuman 2 tahun penjara plus bayar denda Rp 50 juta. Sedangkan Ni Putu Indra Maritim diivonis hukuman 3 tahun penjara, plus bayar denda Rp 50 juta dan wajib mengembalikan uang pengganti kerugian negara Rp 379 juta. Sebaliknya, Wayan Sudiasa divonis hukuman 2 tahun penjara, plus bayar denda Rp 200 juta dan membayar ganti rugi Rp 99,18 juta.

Kelima terpidana kasus korupsi proyek pengadaan 14 item barang dan jasa di IHDN Denpasar ini sudah dijebloskan ke sel tahanan sejak 18 November 2013 silam atau 11 bulan sebelum divonis bersalah. Kwartet Prof Made Titib, Dr Praptini, Drs Nyoman Suweca, dan Wayan Sudiasa ditahan di LP Kerobokan, Kecamatan Kuta, Badung. Sedangkan Ni Putu Indra Maritim ditahan terpisah di Rutan Gianyar.

Edisi : Jumat, 6 November 2015

Hal : 15



Status SPK SLK Akan Ditinjau Ulang

Kemendikbud, Rekening PT Salahi Aturan

DENPASAR - Dirjen Pendidikan Dasar Kemendikbud akhirnya angkat bicara soal Sekolah Lentera Kasih (SLK) Bali. Bahkan, Kemendikbud akan menurunkan tim guna mengecek kebenaran bahwa SLK Bali masih menggunakan rekening Perseroan Terbatas (PT) Bali Permata Hati untuk pembayaran biaya sekolah.

"SLK Bali tahun ini mendapat (status) Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) dari Kementerian. Bicara SPK, semua pengelolaan sekolah harus melalui yayasan," kata Kasubag Kerjasama Dirjen Pendidikan Dasar Kemendikbud Nurma Dewi Saleh saat dihubungi *Jawa Pos Radar Bali* kemarin (5/11). Dia menjelaskan, berdasar dokumen yang dikirimkan SLK Bali menyatakan bahwa sekolah dikelola Yayasan Bali Lentera Kasih Permata Hati.

Ini juga yang menjadi dasar keluarnya SPK bagi SLK Bali.

Nah, terkait praktek yang berbeda, tentu Kemendikbud akan menindaklanjuti hal tersebut. Jika benar faktanya demikian, tentu itu sudah menyalahi aturan serta status SPK SLK Bali bisa ditinjau ulang. "Pengelolaan oleh Yayasan dan harusnya menggunakan rekening Yayasan. Mengapa harus ke rekening PT? Kami di Kementerian tentu tidak bisa hari per hari mengecek pelaksanaan sekolah di lapangan. Ini tentu akan kami koordinasikan dengan dinas pendidikan di daerah yang mengawasi langsung," imbuh dia sembari menyatakan dalam pengawasan dunia pendidikan peran masyarakat sangat dibutuhkan. "Setiap informasi masyarakat, akan kami tindaklanjuti," janji dia. Hanya saja, disinggung soal dua badan hukum yang dimiliki SLK Bali sudah menjadi temuan pada 2013, bahkan Disdikpora Bali sudah bersurat ke Kemendikbud, dia mengaku tak mengetahui hal tersebut.



Sambungan - - -

Di bagian lain Kadisdikpora Bali Provinsi Bali TIA Kusuma Wardani menegaskan, semua urusan masalah perizinan dan sebagainya, lebih detail diketahui oleh kabupaten/kota. "Jika ada yang bermasalah dan tidak diselesaikan oleh Disdikpora Badung, kami akan turun," ujarnya di sela-sela pemberian piala siswa, dan guru berprestasi di Kantor Disdikpora Bali kemarin. Mengenai yayasan sendiri, pihaknya menegaskan bahwa, yayasan dalam bidang pendidikan izinnnya harus prosedural dan tidak boleh ada yang kurang

atau melanggar. "Karena ini masalah pendidikan, tidak boleh disepelekan. Saya rasa aturannya sudah jelas," ungkap Wardani. "Transfer uang ke rekening PT itu juga tidak boleh, jika benar demikian kami akan telusuri," ungkapnya.

"Kenapa minta komentar Disdikpora Bali, kan dokumennya di Disdikpora Badung. Tidak ada kaitannya dengan Disdikpora Bali," jawab M. Rifan, Konsultan Hukum SLK Bali ketika dikonfirmasi terkait pembayaran biaya sekolah ke rekening PT Bali Permata Hati yang menyalahi aturan. "Yayasan SLK

kan hirarki administrasinya kan di Badung. Mana tahu Disdikpora Bali. Tidak ada urusan dengan Disdikpora Bali," imbuh dia.

Disinggung soal pembayaran biaya sekolah yang masih ke rekening PT Bali Permata Hati, BII-Kuta Square 2177009031 untuk rekening rupiah, dan Rekening BII-Kuta Square 2177210470 untuk rekening dolar. Dia menegaskan itu juga tidak ada masalah. "Semua uang sekolah masih transfer ke PT, tetapi perlu dicatat, uang tersebut dikelola oleh Yayasan. Jadi tidak ada persoalan," keliat dia. (hen/gup)

Kejari Telusuri Indikasi Tipikor

BERAGAM keganjilan yang terjadi di Sekolah Lentera Kasih (SLK) Bali langsung mendapat respons Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar. Bahkan, menurut Kasi Intel Kejari Denpasar Syahrir Sagir, pihaknya akan segera turun melakukan pengumpulan data hingga klarifikasi terkait dugaan adanya indikasi Tindak Pidana Korupsi (SLK).

Baik itu soal keluarnya perizinan sejak awal

sekolah berdiri hingga dua badan hukum yang dimiliki sekolah tersebut. "Kami akan koordinasi di internal. Kami coba melakukan pengecekan apa benar ada Tipikor, atau suap dan lainnya. Atau pungutan-pungutan tidak benar," ungkapnya. Dia mengatakan, jika nanti ada hasil pasti akan disampaikan ke media. "Nanti kalau kami temukan, kami akan sampaikan ke media," janji Jaksa yang hoby nyetir jarak jauh ini. (art/gup)

Edisi : Jumat, 6 November 2015

Hal. : 24